

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang terletak dipantai barat Pulau Sumatera dan berada antara 00°44'00'' sampai 01°08'35'' Lintang Selatan serta antara 100°05'05'' sampai 100°34'09'' Bujur Timur. Kota Padang memiliki luas daerah 694,96 km² dan keliling 190 km² dengan ketinggian 0-1853 meter dari permukaan laut. Seperti daerah Indonesia lainnya Kota Padang juga merupakan daerah yang beriklim tropis.

Pada awalnya luas Kota Padang adalah 33 km², yang terdiri dari 3 kecamatan dan 3 buah kampung, yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Selatan dan Padang Timur. Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980 wilayah Kota Padang menjadi 694,96 km², yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan. Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan, yaitu: Padang Utara, Padang Selatan, Padang Barat, Padang Timur, Koto Tengah, Pauh, Kuranji, Nanggalo, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, dan Bungus Teluk Kabung. Dari 11 Kecamatan ini terdapat 193 kelurahan, jumlah kelurahan ini sebelum otonomi daerah dan setelah adanya otonomi daerah ditetapkan menjadi 103 kelurahan.

Kelurahan Pasia Nan Tigo merupakan daerah pesisir Kecamatan KotoTengah, Kota Padang. Secara administratif, kelurahan ini baru terbentuk pada tahun 2001 dari hasil penggabungan beberapa kelurahan berdasarkan penerapan peraturan daerah No. 25/tahun 2001 tentang penggabungan beberapa kelurahan dalam rangka pelaksanaan OTODA (Otonomi Daerah).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu wilayah pesisir (Kelurahan Pasia Nan Tigo) umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Haryani, 2012).

Sebagian besar nelayan di Indonesia merupakan nelayan tradisional yang selalu berhadapan dengan berbagai masalah, seperti kurangnya modal, kualitas hasil tangkapan yang buruk, jumlah tangkapan sedikit, tekanan dari majikan, dan musim yang selalu berubah. Masalah-masalah tersebut yang dapat mempengaruhi keragaman ekonomi dan kehidupan rumah tangga para nelayan (Pasandaran 1990, dalam Baliwati *et al.*, 1992).

Para nelayan yang ada di Kelurahan Pasia Nan Tigo merupakan nelayan yang kegiatan melautnya sangat bergantung dengan cahaya bulan. Penangkapan ikan tidak akan dilanjutkan jika cahaya bulan sangat terang. Hal ini disebabkan cahaya kapal akan tersaingi oleh cahaya bulan yang mengakibatkan ikan akan menyebar. Selain itu, para nelayan ini masih menggunakan alat tangkap yang tradisional sehingga ketika kapal asing ikut menangkap ikan maka kapal para nelayan ini akan kalah saing. Selain itu, sebagian besar para nelayan memiliki pola kerja homogen yang bergantung hanya pada satu sumber penghasilan yang menjadi persoalan keterpurukan klasik. Kesanggupan memiliki modal yang lemah, permainan harga jual ikan, dan terbatasnya daya serap industri pengolahan ikan masih menjadi permasalahan yang tidak pernah terselesaikan. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan hasil tangkapan yang terbatas dan belum adanya kebijakan pemerintah yang memihak kepada nelayan menjadi permasalahan dalam daya saing nelayan kecil sampai hari ini (Anwar dan Wahyuni, 2019).

Para nelayan tradisional mengambil peran yang besar dalam meningkatkan

produktivitas perikanan nasional, namun peran tersebut tidak membawa pengaruh yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Kehadiran program-program campur tangan pembangunan yang khusus untuk masyarakat pesisir seperti program PEMP atau proyek *Co-Fish*, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), merupakan bentuk pengakuan atas terdapatnya kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan. Kebijakan modernisasi perikanan yang mulai diadakan intensif pada awal tahun 1970-an untuk meningkatkan produktivitas perikanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ternyata belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat nelayan (Anwar dan Wahyuni, 2019).

Sebagai nelayan tradisional yang tergolong ke dalam kelompok masyarakat miskin, kehidupan para nelayan sangat memprihatinkan karena mereka sering dijadikan objek eksploitasi oleh para pemilik modal atau para pedagang tengkulak yang menyebabkan distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Teknologi yang digunakan juga masih bersifat tradisional yang akhirnya dengan produktivitas rendah, maka pendapatan juga rendah. Modernisasi perikanan juga membuat nelayan tradisional terpinggirkan karena munculnya kapal tangkap yang berukuran besar dan teknologi modern.

Menurut Suyanto (2000), pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimiliki, dimana bagi nelayan pendapatan yang mereka peroleh berasal dari pemanfaatan ikan yang mereka tangkap dilaut. Pendapatan usaha tangkap nelayan sangat berbeda dengan jenis usahalainnya, seperti pedagang atau bahkan petani. Jika pedagang dapat mengkalkulasikan keuntungan yang diperolehnya setiap bulannya, begitu pula petani dapat memprediksi hasil panennya, maka tidak demikian dengan nelayan yang kegiatannya penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*) serta bersifat spekulatif dan fluktuatif (Wahyono *et al.*, 2001).

Pendapatan berkaitan erat dengan perubahan dan perbaikan konsumsi pangan, sehingga disimpulkan bahwa pendapatan yang berubah juga akan mempengaruhi konsumsi pangan. Pendapatan yang tinggi lebih memiliki peluang yang besar untuk memperoleh pangan yang berkualitas dan juga dapat menambah kuantitasnya.

Sedangkan jika pendapatan yang diperoleh rendah maka pangan yang diperoleh juga akan turun kuantitas dan kualitasnya (Hardiansyah, 1985).

Berbagai hasil penelitian selama ini telah mengatakan bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan tergolong dalam kategori nelayan buruh atau nelayan kecil yang hidup didalam kubangan. Kesanggupan para nelayan dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Diantara berbagai jenis kebutuhan pokok kehidupan, kebutuhan yang paling penting bagi nelayan adalah pangan. Jaminan pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari bagi nelayan akan sangat berperan besar untuk keberlangsungan hidup mereka (Kusnadi, 2003).

Tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan oleh hasil tangkapannya. Banyaknya tangkapan tercermin pula besar pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk keperluan konsumsi keluarga tidak terkecuali konsumsi pangan. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan keluarga atau kebutuhan fisik minimum sangat ditentukan oleh pendapatan yang diterima (Sujarno, 2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mendefinisikan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi tersebut ketahanan pangan memiliki lima unsur yang harus dipenuhi: (i) Berorientasi pada rumah tangga dan individu, (ii) Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses, (iii) Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial, (iv) Berorientasi pada

pemenuhan gizi, dan (v) Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif (Hanani, 2008).

Menurut Chang (1997) Ketahanan pangan bagi rumah tangga meliputi tiga sub sistem utama yaitu:

(1) Ketersediaan pangan (*Food Availability*)

(2) Akses Pangan (*Food Access*)

(3) Penyerapan Pangan (*Food Utilization*)

Seluruh sub sistem harus dipenuhi secara utuh. Jika salah satu sub sistem tidak dipenuhi maka negara tersebut belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun ketersediaan pangan di tingkat nasional cukup, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh (Siregar, 2009).

Menurut Salim dan Darmawanty (2016), kondisi ketahanan pangan bagi rumah tangga nelayan sulit dicapai apabila akses rumah tangga nelayan terhadap pangan dalam kondisi yang rendah, khususnya dari sisi ekonomi seperti pendapatan, kesempatan kerja dan harga pangan. Jika akses pangan para nelayan lemah maka rumah tangga nelayan juga sangat mungkin mengalami ketidakpastian dalam mencapai kondisi kecukupan pangan (*food sustainability*).

B. Rumusan Masalah

Menurut Susanti (2019), jumlah warga miskin di Indonesia didominasi oleh penduduk di wilayah pesisir. Hal ini disebabkan karena secara umum penduduk pesisir menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain: a) Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, b) Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga memengaruhi dinamika usaha, c) Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, d) Kualitas sumberdaya masyarakat yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, e) Degradasi sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan f) Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Haryani, 2012).

Berdasarkan penelitian oleh Haryani (2012), bahwa dari jumlah nelayan yang terdapat di Pasia Nan Tigo, 35% diantaranya masuk dalam kategori miskin. Kemiskinan ini selain disebabkan oleh faktor akses dan finansial, juga disebabkan kondisi iklim dan fisiografi. Dalam satu tahun, hanya 6 - 7 bulan saja nelayan dapat melaut, sehingga kebutuhan hidup tergantung jumlah uang dengan perjanjian pembayaran setelah kembali dari melaut. Kehidupan nelayan sangat tergantung pada pinjaman kepada tetangga. Sementara itu dari sisi fisiografis, permukiman nelayan yang berada disepanjang pantai terbuka dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia merupakan pantai yang teridentifikasi rawan bencana badai, gelombang tinggi, abrasi dan ancaman tsunami serta bencana alam lainnya (Haryani, 2018).

Aktivitas ekonomi masyarakat di pesisir memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada para sampel penelitian, pendapatan yang mereka peroleh dari hasil melaut tidak stabil dan rata-rata pendapatan yang diperoleh hanya mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga mereka yaitu pangan. Masalah utama yang membuat pendapatan mereka tidak stabil adalah pekerjaan mereka sangat tergantung dengan kondisi iklim dan cuaca. Jika dalam sebulan terjadi hujan badai maka mereka tidak bisa pergi melaut dan tidak ada pendapatan, sehingga mereka meminjam uang kepada tetangga mereka atau menjual barang-barang rumah tangga yang bisa menghasilkan uang yang setidaknya mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Perbedaan kualitas sumberdaya juga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah sehingga pendapatan yang dihasilkan juga rendah, begitupun sebaliknya. Adapun kualitas sumberdaya yang rendah ini disebabkan oleh pendidikan para nelayan Pasia Nan Tigo yang rendah. Mayoritas pendidikan para nelayan Pasia Nan Tigo ini berada pada bangku Sekolah Dasar (SD).

Selain itu, mayoritas nelayan di Pasia NanTigo memiliki status sebagai anak

buah perahu yang masih mengandalkan perahu dayung sehingga kalah dengan nelayan yang sudah memakai perahu mesin tempel. Hal tersebut tentu membuat adanya pendapatan yang berbeda diantara masing-masing nelayan. Alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan Kelurahan Pasia Nan Tigo juga masih tradisional yaitu jaring dan pancing. Kedua alat tangkap tersebut sudah ketinggalan zaman karena sudah tidak efektif dan efisien lagi jika digunakan untuk menangkap ikan dalam jumlah banyak. Disamping itu, terdapat kapal-kapal asing yang berdatangan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang lebih modern sehingga para nelayan Kelurahan Pasia Nan Tigo sulit menangkap ikan karena kalah saing. Adapun keinginan para nelayan Kelurahan Pasia Nan Tigo untuk membeli peralatan tangkap yang lebih modern agar mampu bersaing, namun mereka tidak mampu untuk membelinya karena terbatasnya modal.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa ketahanan pangan di tingkat nasional atau wilayah tidak selalu berarti bahwa tingkat ketahanan pangan di rumah tangga dan individu juga terpenuhi. Berbagai permasalahan membuktikan bahwa para nelayan Kelurahan Pasia Nan Tigo belum sejahtera dan belum mampu mencukupi kebutuhan pangannya yang biasa disebut rawan pangan. Apabila ketiga sub sistem ketahanan pangan tidak tercapai, maka ketahanan pangan tidak mungkin terwujud dan akhirnya mengakibatkan kerawanan pangan (Suryana, 2003). Jika pendapatan atau akses ekonomi yang diperoleh oleh para nelayan stabil, maka kemungkinan mereka bisa mencukupi kebutuhan fisiologis yaitu salah satunya kebutuhan pangan.

Dari uraian diatas maka timbul beberapa pertanyaan berikut :

1. Bagaimana tingkat pendapatan rumah tangga nelayan di Kelurahan Pasia NanTigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
2. Bagaimana tingkat ketahanan pangan rumah tangga nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Nelayan sebagai pelaku yang sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi perairan Indonesia perlu diberikan perhatian oleh berbagai pihak sehingga mereka tidak hanya menyejahterakan negara, tetapi juga mampu menyejahterakan rumah

tangganya. Oleh sebab itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tingkat Pendapatan dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”** .

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Menganalisis tingkat pendapatan rumah tangga nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
2. Menganalisis tingkat ketahanan pangan rumah tangga nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari dilakukan penelitian ini, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai ketahanan pangan pada rumah tangga nelayan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Sebagai sarana menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar.
3. Memberikan informasi dan masukan terkait permasalahan ketahanan pangan di Daerah setempat dan juga sebagai masukan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.